

KELAYAKAN STIMULUS MODAL PADA BANK MILIK NEGARA

Feasibility of Equity Stimulus in State Owned Banks

Mohamad Nasir

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, JL. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat 10710,
DKI Jakarta, Indonesia, annasiru@fiskal.depkeu.go.id

Naskah Diterima : 13 April 2015

Disetujui Diterbitkan : 25 Juni 2015

Abstract

The condition of Indonesia's credit access is still not optimal yet, and currently a great amount of fund for infrastructure development is really needed. This raises an idea to stimulate State Banks (Bank Mandiri, BRI, and BNI) by providing additional equity such that they can increase significant third parties' fund. Given the limited state budget, feasibility study should be done to measure the effectiveness of this stimulus. By using descriptive analysis method, data of credit, financial, and leverage performance, the paper concludes that additional equity allocation to State Banks particularly Bank Mandiri and BRI is virtuous. It is supported by the results of analysis that show: 1) State Banks' excellent credit performance and LDR compared to BCA 2) State Banks' robust economic performance as represented by satisfying profitability and profound capital support and 3) good leverage performance that's better than BCA. With the assumption of 3 billion rupiah "state equity support", estimated fund from third parties that can be collected around Rp39.45 trillion in the form of liabilities, and Rp2.09 trillion in the form of new equity. Furthermore, this paper recommends: 1) implementing this idea by allocating fund as additional equity for Bank Mandiri and BRI, 2) encouraging State Banks to improve their efficiency performance, 3) arranging key performance indicators for the management of State Banks and 3) directing the fund channeling to low risk infrastructure development.

Keywords: bank, equity, feasible, financial, intermediation, performance.

Abstrak

Kondisi akses kredit Indonesia kurang optimal dan saat ini membutuhkan dana pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Hal ini memunculkan gagasan untuk memberikan stimulus PMN pada bank BUMN (Bank Mandiri, BRI, dan BNI) agar dapat mengumpulkan dana pihak ketiga dalam jumlah yang besar. Ditengah keterbatasan APBN, studi kelayakan perlu dilakukan untuk mengukur ketepatan stimulus tersebut. Dengan menggunakan analisis deskriptif, dan kinerja penyaluran kredit, kinerja keuangan, dan kinerja *leverage*, paper menunjukkan bahwa gagasan PMN pada bank BUMN layak untuk dilakukan, khususnya pada Bank Mandiri dan BRI. Hal ini terlihat dari : 1) pencapaian penyaluran kredit yang besar secara nominal, serta tingkat LDR yang sehat dan kompetitif bila dibandingkan dengan BCA, 2) kinerja keuangan yang baik sebagaimana terlihat dari pencapaian keuntungan yang besar dan dukungan modal yang kuat, dan 3) kinerja *leverage* lebih baik dibandingkan dengan BCA. Dengan asumsi PMN Rp3 triliun, diperkirakan bank BUMN mampu mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp39,45 triliun dalam bentuk kewajiban dan Rp2,09 triliun dalam bentuk ekuitas baru. Selanjutnya, paper ini merekomendasikan 1) implementasi gagasan dengan mengalokasi PMN pada Bank Mandiri dan atau BRI, 2) mendorong bank BUMN untuk memperbaiki kinerja efisiensi, 3) menyusun indikator kinerja utama para manajemen bank

BUMN, dan 3) mengarahkan penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko rendah.

Kata Kunci : bank, intermediasi, layak, keuangan, kinerja, modal.

JEL Classification : G210

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, peran perbankan dalam perekonomian nasional Indonesia mengalami peningkatan. Bank Indonesia (2015) melaporkan bahwa terjadi peningkatan penyaluran dana yang signifikan, dari semula Rp2.046,5 triliun pada tahun 2008, melompat 171,5% menjadi Rp5.555,8 triliun pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata 18,2% per tahun selama periode 2008 s.d 2014. Dari penyaluran dana tersebut, bank umum tetap memberikan kontribusi besar dalam penyaluran dana secara nasional, yaitu rata-rata berkontribusi 98,5% per tahun dalam periode 2008 s.d 2014, sedangkan sisanya 1,5% per tahun merupakan kontribusi dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dari sisi pertumbuhan penyaluran, baik bank umum dan BPR masing-masing tumbuh 18,2% dan 18,6% per tahunnya.

Namun demikian, pencapaian penyaluran yang terjadi tampaknya belum dapat dikatakan optimal bila dibandingkan dengan penyaluran kredit yang terjadi di beberapa negara Asia dan Pasifik khususnya negara tetangga ASEAN. Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) (2014), rasio kredit dalam negeri terhadap PDB Indonesia pada tahun 2012 mencapai 42,6%, sedangkan Malaysia 134%, Thailand 169,6%, Singapura 99,5%, dan Filipina 50,9%. Selanjutnya, bank nasional tampaknya dihadapkan pada sebuah tantangan kredit di masa yang akan datang, di mana tercatat dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah memperkirakan ada kebutuhan dana sebesar Rp5.452 triliun untuk pembangunan infrastruktur agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 6% s.d. 8% atau rata-rata 7% per tahunnya.

Kinerja penyaluran dan tantangan pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari peran bank-bank yang dimiliki oleh negara atau bank BUMN. Pemerintah memiliki 4 bank BUMN yaitu Bank Mandiri (BM), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) per Mei 2014. Keempat Bank BUMN tersebut di atas mempunyai kontribusi terhadap perbankan nasional yang cukup signifikan, mengingat penyaluran kreditnya rata-rata mencapai 35,6% per tahunnya dari penyaluran kredit bank umum nasional di Indonesia sepanjang tahun 2012 s.d. 2014 (BI. 2015).

Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas tampaknya perlu mendorong, mengintervensi, dan menstimulus bank BUMN untuk melakukan optimalisasi upaya penyaluran kredit dan pengumpulan dana. Beberapa cara atau strategi dapat dipertimbangkan untuk dilakukan oleh Pemerintah. Dari sisi penyaluran, Pemerintah dapat mendorong dengan cara antara lain : 1) memberikan target penyaluran kepada manajemen bank BUMN selaku agen pemegang saham, 2) memberikan subsidi premi penjaminan kredit sebagaimana telah diimplementasikan pada program kredit usaha rakyat, 3) memberikan jaminan risiko atas proyek yang tercakup dalam skema *public private partnership* (PPP). Sementara itu, dari sisi pengumpulan dana, Pemerintah dapat pula memberikan target pengumpulan dana kepada manajemen bank BUMN, dan mempertimbangkan peningkatan ekuitas atau modal bank BUMN.

Fokus pada peningkatan ekuitas, upaya ini dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan fiskal APBN, dari bank BUMN sebagai sumber pendapatan (*source of revenue*) APBN menjadi *agent of*

development Pemerintah. Sebagai sumber pendapatan, bank BUMN didorong untuk membagikan laba bersihnya sebagai dividen kepada Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan APBN. Akibatnya, kapitalisasi modal Bank BUMN yang berasal dari laba bersih tidak dapat berkembang optimal atau tumbuh terbatas. Sebaliknya, Bank BUMN sebagai *agent of development* menempatkan bank BUMN sebagai agen pengumpul dana pembangunan (*leverage*), konsekuensinya adalah peningkatan kapasitas ekuitas bank BUMN perlu dilakukan. Peningkatan kapasitas ekuitas dapat dilakukan dengan 2 kebijakan stimulus, yaitu tidak menarik dividen dan kalau perlu diberikan stimulus berupa penambahan modal negara (PMN).

Ditengah kondisi APBN sedang yang defisit dan terbatas, serta tuntutan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar sebagaimana diuraikan di atas, Pemerintah tampaknya perlu mempertimbangkan pemberian stimulus PMN pada bank BUMN. Namun demikian, Pemerintah perlu pula mengetahui terlebih dahulu tentang seberapa jauh kelayakan stimulus tersebut diberikan. Merujuk pada hal ini, paper ini bermaksud untuk memaparkan kelayakan PMN tersebut dengan menganalisis 3 parameter yang saling berkaitan yaitu : 1) kemampuan penyaluran kredit dari dana yang terkumpul, 2) kinerja keuangan, dan 3) potensi dana yang dapat diungkit (*leverage*) oleh bank BUMN. Di samping itu, paper ini juga dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah, sebagai pemegang saham, dalam pengambilan kebijakan yang tepat sebagai upaya memperbaiki kinerja bank BUMN bila kinerjanya tidak baik, dan upaya mendorong menjadi lebih baik.

II. KAJIAN LITERATUR

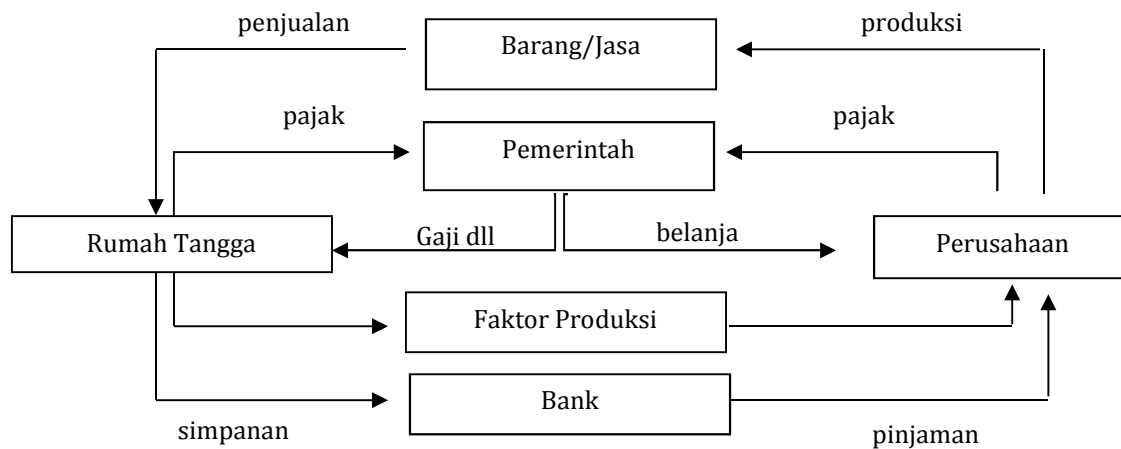
2.1. Bank dan Perekonomian

Bank merupakan sebuah kata yang telah biasa dikenal oleh masyarakat, dan secara sederhana didefinisikan sebagai tempat menyimpan uang dan sekaligus tempat meminjam uang manakala masyarakat membutuhkan uang. Sementara itu, UU No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Secara umum, fungsi bank dapat diklasifikasikan menjadi tiga fungsi yaitu : *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Budisantoso & Triandaru. 2006). Bank disebut *agent of trust* dilatarbelakangi oleh landasan utama dari usaha perbankan yaitu kepercayaan. Bank tidak mungkin dapat mengumpulkan dana dari masyarakat, investor, dan pihak lainnya apabila mereka tidak mempercayai bank untuk mengelola dana yang dimilikinya. Maksudnya, bank dipercaya mampu mengembalikan dana apabila akan ditarik kembali oleh pemiliknya. Pengertian dapat dipercaya mempunyai dua sudut pandang yaitu dipercaya secara karakter bank dan dipercaya secara kemampuan keuangan. Dipercaya secara karakter didefinisikan bahwa bank sebagai badan usaha dikenal sebagai badan usaha yang memiliki *governance* yang baik dan tidak pernah melakukan wanprestasi. Sementara itu, dipercaya secara keuangan, bank memiliki aset yang cukup dan usaha yang menguntungkan, sehingga bank mampu secara keuangan mengembalikan dana masyarakat dan lain-lainnya.

Fungsi *agent of development* tampak pada kegiatan usaha bank menghimpun dan menyalurkan dana, atau dapat disebut sebagai fungsi intermediasi. Sebuah fungsi yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan atau surplus dana kepada pihak yang mengalami defisit dana. Fungsi ini sangat dibutuhkan dan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Gambaran peran bank sebagai *agent of development* dapat terlihat dalam **Gambar 2.1**. Pihak surplus modal menitipkan dananya kepada bank dalam bentuk tabungan atau deposito atau bentuk lainnya.

Selanjutnya, bank menyalurkan uang yang dititipkan tersebut kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit yang nantinya digunakan untuk menambah kapasitas produksi, membangun pabrik, dan lain sebagainya.



Sumber : Anda P. 2014. Dimodifikasi.

Gambar 2.1. *Circular Flow of Economic Activity.*

Bank sebagai *agent of service* tampak pada kegiatan usaha lainnya. Secara formal kegiatan jasa lainnya ini dibolehkan menurut peraturan. UU No. 7 tahun 1992 mengatur bahwa kegiatan usaha bank umum yang diperbolehkan antara lain : 1) menghimpun dana dari simpanan masyarakat, seperti tabungan, deposito dan lain-lain, 2) memberikan kredit, 3) menerbitkan surat utang, 4) membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya atas surat wesel, surat utang, SBI, dan surat berharga lainnya, 5) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat, dan 6) kegiatan lainnya. Beberapa contoh kegiatan usaha lainnya adalah jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, dan jasa pembayaran.

Beberapa kajian menunjukkan peran perbankan dalam perekonomian. Konadi (2014) melakukan penelitian tentang hubungan antara kredit investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan menggunakan data kredit investasi dan penyerapan tenaga kerja pada periode 2003-2013, serta menggunakan metode analisis regresi linear, diperoleh hasil kajian sebagai berikut : 1) pertumbuhan kredit investasi dapat meningkatkan perkembangan usaha, dan akhirnya meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja, 2) terdapat hubungan yang positif dan searah antara peningkatan kredit investasi dengan penyerapan tenaga kerja, dan 3) secara statistik, pengaruh kredit terhadap penyerapan tenaga kerja signifikan dengan tingkat determinasi sebesar 79%. Irwan (2010) juga melakukan penelitian hal yang sama, namun dengan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan melakukan tinjauan fungsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi intermediasi perbankan nasional. Berdasarkan penelitian, diperoleh beberapa hasil penelitian antara lain : 1) terdapat hubungan yang positif antara LDR dengan PDB dengan tingkat koefisien 77,3, artinya setiap peningkatan 1% PDB maka LDR diperkirakan dapat meningkat 77,3%, 2) LDR juga mempunyai hubungan yang positif dengan NPL dengan koefisien 4,32, dan 3) berbeda dengan PDB dan NPL, LDR mempunyai hubungan negatif dengan tingkat suku bunga kredit dengan tingkat koefisien -0,11968, artinya peningkatan 1% pada suku bunga kredit dapat menurunkan LDR sebesar 0,11968.

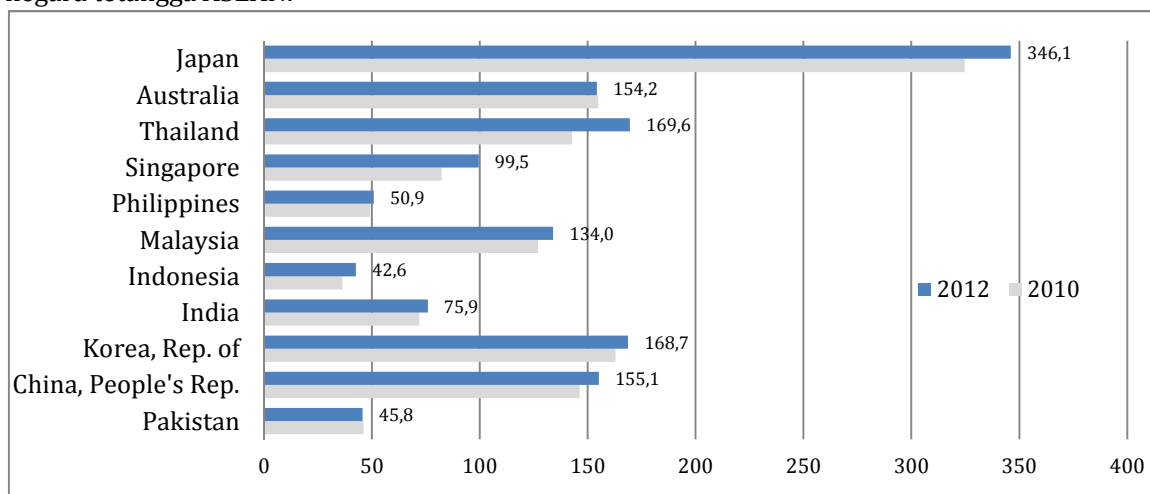
Setifandy (2014) mengungkapkan pula hubungan fungsi intermediasi melalui variabel bebas NPL dengan variabel tidak bebas kinerja keuangan bank yang mencakup *bank size*, LDR, dan CAR, serta variabel tidak bebas makro ekonomi yang terdiri dari GDP dan inflasi. Penelitian ini

menggunakan pendekatan studi kasus bank umum dan data dari periode 2002 s.d 2013. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang positif antara NPL dengan bank size, LDR, CAR dan inflasi, namun mempunyai hubungan yang negatif dengan GDP. Temuan hubungan positif dengan GDP menguatkan hasil kajian Irwan (2010). Setifandy (2014) menyatakan bahwa setiap peningkatan GDP 1% maka NPL mengalami penurunan sebesar $-1,2 \times 10^{-14}$ % dalam periode observasi dan variabel yang lain tetap.

2.2. Persoalan Intermediasi dan Pendirian Bank BUMN

Uraian di atas menunjukkan bahwa bank memberikan peran yang strategis dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Namun demikian, pencapaian intermediasi keuangan di Indonesia bukan persoalan yang mudah. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia (2010), menunjukkan bahwa dalam hal akses simpanan, sekitar 68% responden penduduk Indonesia yang terlayani jasa simpanan, dan sekitar 47% responden yang menabung di bank. Sementara itu, dalam hal penarikan pinjaman, hanya 60% responden yang terlayani jasa pinjaman, dan hanya sekitar 27% yang terlayani pinjaman dari bank dan lembaga keuangan mikro (Bank Dunia. 2010).

Adanya permasalahan intermediasi di Indonesia semakin terlihat bila kinerja penyaluran kredit dalam negeri dibandingkan negara-negara lain. **Gambar 2.2** menunjukkan bahwa kinerja kredit di Indonesia yang direpresentasikan dengan rasio kredit dalam negeri dengan PDB (42,6% di 2012) tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia dan Pasifik, bahkan dengan negara-negara tetangga ASEAN.



Sumber : ADB. 2014.

Gambar 2.2. Kredit Domestik Yang Disediakan Perbankan.

Kegagalan intermediasi karena keterbatasan akses perbankan dapat disebabkan oleh minimal 2 faktor utama. Faktor pertama adalah adanya *gap* kepentingan antara bank dan calon debitur, di mana bank dituntut hati-hati (*prudent*) dalam penyaluran kredit sedangkan calon debitur kurang mampu memenuhi persyaratan kehati-hatian dari bank. Bank Dunia (2010) melaporkan 4 alasan utama mengapa masyarakat tidak mendapatkan akses pinjaman yaitu : 1) kekurangan persyaratan administrasi atau dokumentasi, 2) kurangnya barang jaminan (*collateral*), 3) kurang *feasible* atau pendapatan usaha tidak cukup, dan 4) terlalu banyak pinjaman. Faktor kedua adalah kurangnya sarana dan prasarana perbankan, di mana kantor cabang dan outlet perbankan masih terbatas dan terkonsentrasi di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan kota-kota besar sehingga masyarakat daerah yang terpencil mengalami kesulitan bekerja sama dengan perbankan (Kiryanto. 2012).

Persoalan keterbatasan akses perbankan tentunya menjadi tanggung jawab 3 pihak utama, yaitu pemerintah, otoritas perbankan, dan bank itu sendiri. Fokus pada peran Pemerintah, Pemerintah harus melakukan intervensi manakala terjadi kondisi mekanisme pasar tidak dapat bekerja dalam pencapaian inklusi keuangan di perekonomian dalam suatu daerah tertentu atau calon debitur tertentu atau jenis usaha tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah dan masyarakat. Sebagai contoh, bank komersial atau swasta tidak akan membuka kantor cabang pada suatu daerah tertentu bila daerah tersebut tidak dapat memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan biaya operasional yang dikeluarkannya. Di sisi lain, Pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah tersebut.

Salah satu bentuk intervensi Pemerintah yang telah berjalan dan bertahan selama puluhan tahun, dari era orde baru sampai dengan orde reformasi saat ini, adalah dengan mendirikan BUMN yang bergerak di sektor keuangan, bank dan non bank. Hal ini telah dimediasi dengan ditetapkannya UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Di dalamnya dinyatakan secara jelas tujuan dari pendirian BUMN, yaitu : 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, 2) mengejar keuntungan, 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi, 5) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kepemilikan secara mayoritas atas saham badan usaha perbankan dapat memberikan kemampuan bagi Pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan bank BUMN. Pemerintah dapat mendesain beberapa skema, seperti pola kerjasama, pemberian insentif, atau penugasan kepada bank BUMN agar dapat memberikan kemudahan akses perbankan kepada masyarakat namun tetap mempertahankan tingkat kesehatan bank BUMN tersebut dan tidak melanggar ketentuan bank sentral atau OJK.

Dalam perkembangannya, kepentingan Pemerintah tidak hanya terbatas pada pencapaian inklusi keuangan saja, Pemerintah menginginkan adanya kemampuan *multiplier* dan *return* atas modal yang ditanamkan pada bank BUMN tersebut. Dari modal yang ada, bank BUMN diharapkan dapat menarik sumber pembiayaan eksternal lainnya secara optimal tanpa melemahkan kekuatan permodalan, dan dapat memberikan kontribusi pajak dan dividen dari laba bersih yang optimal pula dengan meningkatkan efisiensi. Terkait dengan *return*, ada perbedaan besar antara Pemerintah dan swasta sebagai pemegang saham dalam mengkapitalisasi *return* yang dihasilkan oleh badan usaha bank. Pihak swasta mengkapitalisasi *return* terbatas dari pembayaran dividen ketika laba bersih tercapai dan *capital gain* ketika harga saham dijual dengan harga lebih mahal dibandingkan harga pembelian. Sementara itu, Pemerintah mengkapitalisasi *return* dari tiga sumber yaitu dividen, *capital gain*, dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha yang dimilikinya tersebut.

2.3. Parameter Kinerja Perbankan

2.3.1. Intermediasi

Kemampuan intermediasi suatu bank secara sederhana dapat terlihat dari kemampuan mengumpulkan dana dari masyarakat khususnya dana pihak ketiga (DPK) dan kemampuan menyalurkan dana yang terkumpulkan tersebut kepada masyarakat. Indikator kinerja yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja intermediasi antara lain : perkembangan DPK, penyaluran, dan *loan to deposit ratio* (LDR). DPK adalah dana yang dikumpulkan oleh bank yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa DPK

adalah sumber dana dari penyaluran kredit. Penyaluran kredit adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (PBI No. 15/7/PBI/2013). LDR adalah perbandingan dari penyaluran kepada pihak ketiga dengan dana dari pihak ketiga, sehingga menunjukkan kemampuan bank dalam mendayagunakan dana yang telah dikumpulkan. Berdasarkan PBI No. 15/7/PBI/2013, LDR perbankan dikatakan ideal apabila pada posisi 78% s.d 100%.

Kinerja intermediasi merupakan kegiatan usaha utama perbankan. Bank mendapatkan pendapatan usaha dari kegiatan penyaluran kredit yang berupa pendapatan bunga, dan harus juga mengeluarkan biaya yang berupa beban bunga sebagai kompensasi atas DPK yang terkumpul, serta biaya operasional lainnya untuk membiayai kegiatan operasional pendukung bank. Oleh karena itu, peningkatan penyaluran kredit, DPK, dan LDR yang diikuti oleh NPL yang rendah, normalnya dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank. Sudiyatno & Suroso (2010), dalam kajiannya, menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara DPK dengan *return on asset (ROA)* bank *go public* selama periode 2005-2008. Sementara itu, Widiari et al. (2014) menemukan pula hubungan yang positif dan signifikan pula antara LDR dan suku bunga dengan pendapatan bunga.

2.3.2. Kinerja Keuangan

Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Secara sederhana, profitabilitas bank dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu pendapatan dan biaya. Bila pendapatan meningkat sementara biaya tetap atau turun, maka profitabilitas meningkat. Bila terjadi sebaliknya, maka profitabilitas bank menurun. Pendapatan bank diklasifikasikan menjadi pendapatan bunga yang berasal dari penyaluran kredit, obligasi yang dimiliki dan lain-lain, dan pendapatan non-bunga yang dapat dari jasa provisi, administrasi dan lainnya. Sementara itu, biaya diklasifikasikan menjadi 2 juga yaitu biaya bunga atau *cost of fund* yang harus dibayarkan kepada pemilik dana, dan biaya non-bunga seperti biaya pegawai, depresiasi dan lain-lain.

Dari uraian di atas, ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas dan efisiensi bank, antara lain : laba bersih yang dicapai, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), *non performing loan (NPL)*, *net interest margin (NIM)*, dan suku bunga dasar bank (SBDK). Laba bersih adalah selisih antara total pendapatan dikurangi total biaya dan pajak penghasilan. BOPO merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi bank dan otomatis berpengaruh terhadap kinerja bank. Sukarno & Syaichu (2006) dalam kajian menemukan bahwa BOPO bank-bank di Indonesia dalam periode 2001-2005 berkorelasi negatif dan signifikan terhadap *return on assets (ROA)*. NPL merupakan perbandingan kredit yang bermasalah dengan kredit yang disalurkan. Semakin besar kredit yang bermasalah maka semakin besar NPL, dan selanjutnya biaya pencadangan aktiva produktif dan biaya lainnya seperti biaya *debt collection*. Indikator NPL bank merupakan indikator kesehatan bank yang sangat penting, bahkan menjadi perhatian khusus regulator atau BI. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional dinyatakan bahwa bank dapat ditetapkan dalam pengawasan intensif jika bank memiliki rasio NPL neto lebih dari 5% dari total kredit.

NIM menurut SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001, merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Yang dimaksud dengan pendapatan bunga adalah selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh dengan biaya bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal. Sementara itu, yang dimaksud dengan aktiva produktif adalah aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan bunga atau *interest bearing assets*. Menurut Koch dan Scott (2000) dalam Rahmawati (2011), NIM dapat digunakan untuk mengukur

kemampuan bank dalam menghadapi risiko yang disebabkan oleh perubahan bunga. Perubahan acuan suku bunga seperti BI rate tentunya akan berpengaruh terhadap *lending rate* dan *cost of fund* bank bersangkutan. Sementara itu, Almilia & Herdiningtyas (2005) berpendapat bahwa NIM dapat menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya.

SBDK atau *prime lending rate* merupakan tingkat bunga pinjaman terendah yang dikenakan kepada nasabah bank, dan secara teknis diatur dalam SE BI No. 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit. Perhitungan SBDK mencakup 3 komponen yaitu 1) harga pokok dana untuk kredit, 2) Biaya overhead yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit, dan 3) Marjin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan. Dari komponen SBDK dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi SBDK maka semakin besar pula biaya yang menjadi beban bank.

Dalam kaitannya dengan kapasitas permodalan, *capital adequacy ratio* (CAR) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kekuatan permodalan yang dimiliki bank. CAR dalam SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dapat diformulasikan sebagai rasio atas modal sendiri terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Formulasi ini menggambarkan kemampuan modal sendiri dalam menopang potensi risiko bila terjadi pada aktiva yang dimiliki oleh bank. Kemampuan permodalan ini sangat penting dalam menjamin kesinambungan bank, karena itu BI mewajibkan penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam PBI No. 15/ 12 /PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Di dalamnya dinyatakan bahwa bank wajib menyediakan modal minimal sebesar 1) 8% dari ATMR bila memiliki profil risiko peringkat 1, 2) 9% s.d kurang dari 10% dari ATMR bila memiliki profil risiko peringkat 2, 3) 10% s.d. kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3, dan 4) 11% s.d 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5. Profil risiko diatur sendiri melalui ketentuan BI tentang penilaian tingkat kesehatan bank, di mana penilaian profil risiko mencakup risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (PBI No. 13/ 1 /PBI/2011).

2.3.3. Kinerja Leverage

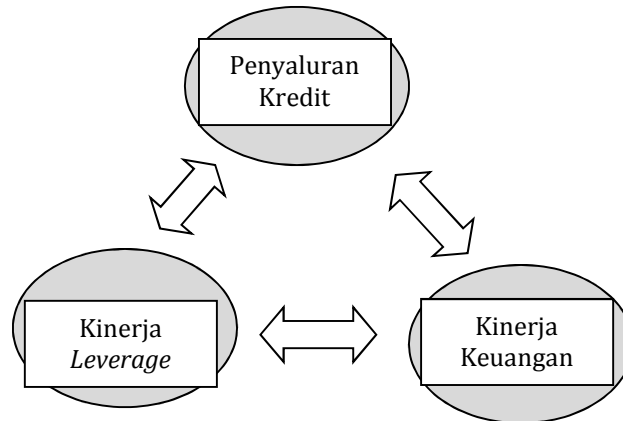
Sementara itu, kemampuan *leverage* dapat diukur dari rasio aset yang dikelola oleh bank dibandingkan dengan ekuitas yang disetorkan oleh pemegang saham atau *asset to equity ratio*. Bagi Pemerintah sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh bank mampu mendanai aset yang dikelola dengan menggunakan dana pinjaman, dan mampu meningkatkan kepentingan Pemerintah sebagai pemegang saham. Dalam hal ini, salah satu kepentingan Pemerintah atas bank yang dimilikinya adalah tersedianya sumber dana cukup dan *feasible* disalurkan untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Namun demikian, kemampuan *leverage* harus diimbangi dengan kapasitas permodalan yang kuat dan kinerja keuangan besar agar kesinambungan bank tetap terjaga.

III. METODOLOGI

3.1. Kerangka Pikir dan Metode Analisis

Sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan bahwa kelayakan PMN didasarkan pada 3 parameter. Parameter pertama adalah kemampuan bank BUMN dalam menyalurkan kredit dari dana dari pihak ketiga yang telah terkumpulkan. Faktor ini dapat tercermin dalam indikator utama

Loan to Deposit Ratio (LDR). Parameter kedua adalah kinerja keuangan yang mencerminkan kemampuan bayar kembali atas kewajibannya dan melandasi kepercayaan (*trust*) atau perasaan aman dari pihak ketiga ketika akan menempatkan dananya pada bank BUMN. Bank yang memiliki kinerja keuangan yang baik akan mendapat kepercayaan yang baik pula dari pihak ketiga. Parameter ketiga adalah kinerja *leverage* bank BUMN, menggambarkan kemampuan dalam melipatgandakan dan mengumpulkan dana pihak ketiga dari ekuitas yang tersedia. Gambaran hubungan ketiga parameter terlihat dalam **Gambar 3.1**.



Sumber : Ilustrasi Penulis

Gambar 3.1. Faktor Penentu Efektifitas Stimulus.

Sementara itu, untuk menentukan apakah kinerja indikator tersebut baik atau tidak, paper ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode analisis yang menggambarkan atas data dan kondisi yang ada. Metode ini terbagi menjadi 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan tren atau perkembangan kinerja dari tahun ke tahun, dengan menggunakan periode observasi 5 tahun, dari periode 2010 s.d. 2014. Analisis tren digunakan untuk mengetahui apakah kinerja bank BUMN mengalami pertumbuhan yang positif atau sebaliknya. Pendekatan kedua adalah pendekatan komparatif atau *benchmarking*, di mana kinerja variabel indikator dalam 3 parameter Bank BUMN di-*benchmark* dengan bank lain atau pembandingan dan peraturan yang ada atau peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagaimana terlihat dalam **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1. Pengukuran Faktor Feasibilitas

PARAMETER	INDIKATOR	PENGUKURAN
Penyaluran Kredit	<ul style="list-style-type: none"> o Nilai Nomial penyaluran o LDR 	<ul style="list-style-type: none"> o <i>Bechmarking</i> dengan bank Lain o PBI dan <i>benchmarking</i> dengan bank lain
Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> o Profitabilitas o BOPO o NPL o SBDK o Kontribusi pada Pemerintah o Kekuatan Permodalan 	<ul style="list-style-type: none"> o <i>Benchmarking</i> dengan bank lain o PBI dan <i>benchmarking</i> dengan bank lain o <i>Benchmarking</i> dengan bank lain o PBI dan <i>benchmarking</i> dengan bank lain
Leverage	<ul style="list-style-type: none"> <i>Aset to equity ratio</i> <i>Potensi Leverage</i> 	<ul style="list-style-type: none"> o <i>Benchmarking</i> dengan bank lain o Simulasi perhitungan

Sumber : Ilustrasi penulis

Sementara itu, bank pembandingan yang digunakan adalah BCA, salah satu bank swasta nasional. Pemilihan BCA sebagai pembandingan didasarkan pada : 1) BCA memiliki sejarah yang

panjang dan terbukti mampu *sustainable* dalam menghadapi krisis ekonomi dan keuangan 1997/1998, 2) mempunyai kinerja keuangan yang baik, bahkan masuk dalam Top 100 ASEAN Bank dalam kategori *return on capital* pada tahun 2014 oleh The Banker, dan 3) meraih beberapa prestasi seperti : a) Bank terbaik di Indonesia tahun 2014 versi Euromoney, b) Bank retail terbaik di Indonesia tahun 2014 versi The ASIAN Banker, dan 3) Perusahaan paling dikagumi dalam bidang perbankan dan layanan keuangan tahun 2014 versi majalah Fortune Indonesia (BCA, 2015).

3.2. Data Yang Digunakan

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data tahunan variabel indikator seperti penyaluran kredit, DPK, laba bersih, BOPO, pajak penghasilan, NPL, NIM, dan lainnya dalam periode 2010 s.d. 2014. Data ini diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh bank BUMN dan Bank Swasta Nasional yang bersangkutan. Data lainnya yang digunakan adalah data SBDK bulanan periode Januari s.d Desember 2014 yang diperoleh dari Bank Indonesia, dan data harga saham harian (harga penutupan) untuk periode Januari s.d Desember 2014 yang diperoleh dari *Bloomberg*. Sementara itu, bank BUMN yang menjadi sampel analisis adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI).

IV. DATA DAN ANALISIS

4.1. Penyaluran Kredit

Kemampuan bank-bank BUMN dalam mengumpulkan DPK mengalami peningkatan dan tetap berkontribusi yang signifikan dalam pengumpulan DPK di tingkat perbankan nasional. DPK yang berhasil dikumpulkan oleh bank BUMN tumbuh 11,2% per tahun dengan kontribusi yang stabil di kisaran 37,5% per tahun dalam rentang periode 2010 s.d 2014. Bank Mandiri adalah bank yang terbesar dalam pengumpulan DPK sepanjang periode 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan 15,1% per tahun, dan pada tahun 2014 meraih DPK sebesar Rp636.381 miliar. Namun demikian, BRI mempunyai potensi menyusul raihan Bank Mandiri, di mana pertumbuhan pengumpulan DPK BRI rata-rata mencapai 16,9% per tahun, dan pada tahun 2014 berhasil mengumpulkan DPK Rp622.322 miliar atau naik 23,4% dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.1. Pengumpulan DPK, Penyaluran Kredit dan LDR (Rp Miliar)

	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mandiri	Pengumpulan DPK	362.212	422.250	482.914	556.342	636.381
	Pinjaman Kotor	246.201	314.381	388.830	472.435	529.973
	LDR - %	65,44	71,65	77,66	82,97	82,02
Bank Rakyat Indonesia	Pengumpulan DPK	333.652	384.264	450.166	504.281	622.322
	Pinjaman Kotor	252.489	294.515	362.007	448.345	510.697
	LDR - %	75,17	76,20	79,85	88,54	81,68
Bank Negara Indonesia	Pengumpulan DPK	194.375	231.296	257.661	291.890	313.893
	Pinjaman Kotor	136.357	163.533	200.742	250.638	277.622
	LDR - %	70,20	70,40	77,50	85,30	87,8

Sumber : Bank Mandiri, BRI, & BNI. 2015. Diolah.

Dalam hal penyaluran kredit, ketiga bank BUMN mengalami perkembangan kinerja yang positif. Bank Mandiri mampu menyalurkan kredit rata-rata Rp390.364 miliar per tahun, dan mencapai pertumbuhan rata-rata 21,3% per tahun dalam periode 2010 s.d 2014. Sementara itu, BRI

dan BNI mampu menyalurkan kredit masing-masing Rp373.611 miliar dan Rp205.778 miliar per tahun dalam periode yang sama. Pertumbuhan penyaluran kredit BRI mencapai 19,3% per tahun, sedangkan BNI mencapai 19,6% per tahun dalam periode waktu tersebut.

Sementara itu, indikator LDR, terlihat dalam **Tabel 4.1** menunjukkan bahwa Bank Mandiri, BRI dan BNI mencapai LDR yang sehat bila mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 15/7/PBI/2013, di mana LDR ketiga bank tersebut dalam rentang LDR sehat yaitu 75% s.d. 100%. Per tahun 2014, LDR Bank Mandiri mencapai 82,0%, BRI mencapai 81,68%, dan BNI mencapai LDR tertinggi yaitu 87,8%.

Bila dibandingkan dengan BCA, kinerja Bank Mandiri dan BRI dalam pengumpulan, penyaluran kredit kotor, dan LDRnya sebagaimana tertera dalam **Tabel 4.1** di atas, masih lebih bagus dari BCA. Per tahun 2014, BCA mampu mengumpulkan DPK sebesar Rp447.906 miliar, penyaluran kredit kotornya Rp346.563 miliar, dan LDR nya sebesar 76,8%. Namun dari sisi pertumbuhan penyaluran kredit, BCA mampu tumbuh lebih tinggi dengan pencapaian rata-rata 22,7% per tahun dalam periode 2010 s.d. 2014.

Dari angka LDR pula, tampak penyaluran yang telah diraih dapat dikatakan belum optimal. Hal ini menunjukkan pula masih adanya potensi penyaluran kredit atau sumber pembiayaan yang *idle* pada ketiga bank BUMN tersebut. Dengan menggunakan asumsi LDR 90% dan 100% dan data tahun 2014 sebagaimana diilustrasikan dalam **Tabel 4.2**, maka potensi kapasitas penyaluran yang belum dioptimal oleh ketiga Bank BUMN tersebut antara Rp109.466 miliar s.d. Rp266.726 miliar.

Tabel 4.2. Simulasi Perhitungan Potensi Penyaluran Kredit 2014 (Rp Miliar)

Bank	DPK 2014	LDR 2014	Kredit Pihak Ketiga Non Bank		
			2014*	LDR 90%**	LDR 100%***
Bank Mandiri	636.381	82,02%	521.960	572.743	636.381
Bank Rakyat Indonesia	622.322	81,68%	508.313	560.090	622.322
Bank Negara Indonesia	313.893	87,80%	275.598	282.504	313.893
Total	1.572.596		1.305.870	1.415.336	1.572.596

Sumber : Bank Mandiri, BRI, & BNI. 2015. Diolah.

Keterangan : * dari perhitungan DPK 2014 x LDR 2014, ** dari perhitungan DPK 2014 x 90%, dan *** dari perhitungan DPK 2014 x 100%

4.2. Kinerja Keuangan Bank BUMN

4.2.1. Profitabilitas

Kemampuan bank BUMN dalam menghasilkan keuntungan sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.3 di bawah menunjukkan peningkatan terus menerus selama periode 2010 s.d. 2014. Secara nominal, bank BUMN meraih laba bersih yang sangat besar, khususnya BRI dan Bank Mandiri. Selama periode observasi, BRI dan Bank Mandiri membukukan laba bersih rata-rata masing-masing Rp18.171 miliar per tahun dan Rp15.519 miliar, dan pencapaian di atas BCA yang meraih Rp12.357 miliar per tahun. Dari sisi pertumbuhan, Bank BUMN juga menunjukkan kinerja yang baik. Tertinggi dicapai oleh BNI dengan pertumbuhan rata-rata 27,7% per tahun meskipun secara nominal jauh dibawah BRI, Bank Mandiri dan BCA. Disusul Bank Mandiri dengan pertumbuhan 22,2% per tahun, BRI 20,8% per tahun dan BCA 18,3% per tahun.

Namun demikian, meskipun bank BUMN khususnya BRI dan Bank Mandiri meraih laba bersih di atas BCA, kemampuan kedua bank BUMN tersebut masih di bawah BCA dalam hal pencapaian profit margin. Selama periode 2010 s.d 2014, profit margin per tahun BCA mencapai 40,6% per tahun, sedangkan BRI 32,6% per tahun, Bank Mandiri 33,9% per tahun, dan BNI 29,5% per tahun.

Tabel 4.3. Perkembangan Laba Bersih (Rp Miliar)

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mandiri	9.369	12.696	16.044	18.830	20.655
Bank Rakyat Indonesia	11.472	15.088	18.687	21.354	24.254
Bank Negara Indonesia	4.103	5.808	7.048	9.058	10.829
Bank Central Asia	8.479	10.818	11.718	14.256	16.512

Sumber : Bank Mandiri, BRI, BNI, & BCA. 2015.

4.2.2. Efisiensi Keuangan

Pencapaian profit margin BCA tidak dapat terlepas dari efisiensi yang terjadi di BCA sebagaimana dipresentasikan dalam **Tabel 4.4.** Dari indikator NIM, tampak bahwa NIM BCA di bawah BRI dan BNI dan sedikit di atas Bank Mandiri. Namun dari indikator NPL bersih, BCA konsisten pada 0,2%, lebih kecil dibandingkan dengan BRI (0,4%), Bank Mandiri (0,4%), dan BNI (0,7%). Hal serupa terlihat pada BOPO, BCA rata-rata mencapai 62,5%, sedangkan Bank Mandiri 65,0%, BRI 64,7%, dan BNI 71,3%. Di samping itu, mengacu pada *benchmarking* BI yang menetapkan bahwa bank-bank dalam kelompok bank umum kelompok usaha (BUKU) ⁴ diharapkan memiliki BOPO pada kisaran 60% - 65%, maka tampak bahwa BNI memiliki kinerja yang tidak diharapkan.

Tabel 4.4. Perkembangan NPL, BOPO, dan NIM (Persen)

Uraian		2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mandiri	NPL	0,54	0,45	0,37	0,37	0,44
	BOPO	66,43	67,22	63,93	62,41	64,98
	NIM	5,39	5,29	5,58	5,68	5,94
Bank Rakyat Indonesia	NPL	0,74	0,42	0,34	0,31	0,36
	BOPO	70,86	66,69	59,93	60,58	65,37
	NIM	10,77	9,58	8,42	8,55	8,51
Bank Negara Indonesia	NPL	1,11	0,51	0,75	0,55	0,39
	BOPO	75,99	72,58	70,99	67,12	69,78
	NIM	5,78	6,03	5,93	6,11	6,20
Bank Central Asia	NPL	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	BOPO	65,1	60,9	62,4	61,5	62,4
	NIM	5,3	5,7	5,6	6,2	6,5

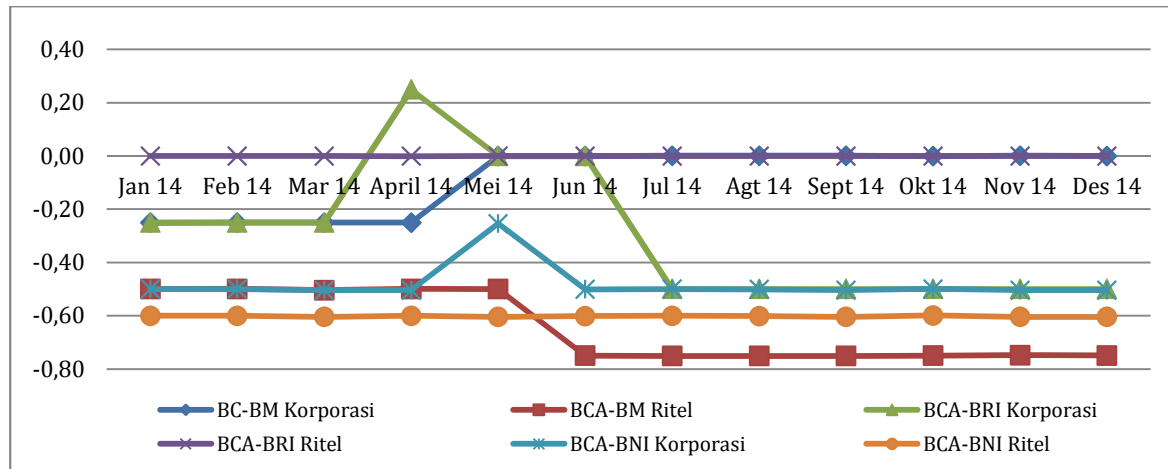
Sumber : Bank Mandiri, BRI, BNI, & BCA. 2015. Ket : NPL merupakan NPL Netto.

4.2.3. Suku Bunga Dasar Kredit

Di samping NPL, BOPO, dan NIM, suku bunga dasar kredit (SBDK) juga dapat dijadikan indikator efisiensi bank. Terlihat dalam **Gambar 4.1**, SBDK retail dan korporasi bank BUMN maupun bank BCA relatif stabil, rata-rata dikisaran 10%-12,5% selama tahun 2014. Namun demikian, bila SBDK bank BUMN dibandingkan dengan BCA sebagai *bechmarking*, maka tampak bahwa SBDK bank BUMN lebih tinggi dibandingkan BCA. Bila kondisi ini dikaitkan dengan **Tabel 4.4**, terlihat bahwa secara umum bank BUMN kurang kompetitif dari sisi *overhead cost* sebagaimana terlihat dalam BOPO dan kualitas penyaluran kredit sebagaimana terlihat dari kinerja NPL. Tingginya SBDK bank

¹ Berdasarkan PBI No. 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Pasal 3 ayat (1), berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) badan usaha kelompok usaha (BUKU) yaitu: a) BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari satu triliun Rupiah, b) BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1 triliun s.d Rp5 triliun. c) BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5 triliun s.d Rp30 triliun d). BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30 triliun.

BUMN dari sudut pandang kepentingan intermediasi Pemerintah dan status bank BUMN adalah milik negara, maka kondisi ini dapat dikatakan bahwa bank BUMN kurang mendukung kepentingan Pemerintah yang berkeinginan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan biaya bunga.



Sumber : Bank Indonesia. 2015. SBDK. Diolah.

Gambar 4.1. Selisih SBDK BCA dengan Bank BUMN.

4.2.4. Kepentingan Keuangan Pemerintah dan Pemegang Saham

Sebagai penyelenggara Pemerintahan, Pemerintah mendapatkan benefit keuangan atas kinerja keuangan berupa pajak penghasilan atau PPh. **Tabel 4.5** menunjukkan bahwa BRI merupakan bank yang berkontribusi terbesar dalam hal PPh yaitu Rp25.437 miliar selama periode 2010 s.d 2014, sedangkan Bank Mandiri Rp23.465 miliar, BCA Rp15.732 miliar dan BNI Rp9.801 miliar dalam periode yang sama. Dari sisi pertumbuhan kontribusi pajak per tahunnya, BRI pun mempunyai pertumbuhan yang besar yaitu 18,8% per tahun. Sementara itu, BCA tumbuh 18,4% per tahun, BNI 18,2% per tahun, dan Bank Mandiri 4,9% per tahun dalam 5 tahun buku terakhir.

Tabel 4.5. Kontribusi Pajak Penghasilan (Rp Miliar)

Kontribusi Pajak	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mandiri	4.603	3.816	4.461	5.232	5.353
Bank Rakyat Indonesia	3.436	3.668	5.172	6.556	6.605
Bank Negara Indonesia	1.382	1.653	1.851	2.220	2.695
Bank Central Asia	2.174	2.801	2.968	3.559	4.229

Sumber : Bank Mandiri, BRI, BNI, & BCA. 2015.

Tabel 4.6. Perkembangan ROE (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mandiri	33,1	25,6	27,2	27,3	25,8
Bank Rakyat Indonesia	43,8	42,5	38,7	34,1	31,2
Bank Negara Indonesia	24,7	20,1	20,0	22,5	23,6
Bank Central Asia	33,3	33,5	30,4	28,2	25,5

Sumber : Bank Mandiri, BRI, BNI, & BCA. 2015.

Dalam hal sebagai pemegang saham, Pemerintah memiliki kepentingan atas perkembangan tingkat pengembalian investasinya yang berupa saham pada bank BUMN yang diindikasikan dalam *return on equity* (ROE). **Tabel 4.6** menunjukkan BRI mampu memberikan *return* kepada pemegang saham yang terbaik baik dibandingkan dengan BUMN lainnya maupun dengan BCA. ROE rata-rata BRI dalam periode 2010 s.d. 2014 mencapai 38,1% per tahun, sedangkan Bank Mandiri 27,8% per

tahun, BCA 30,2% per tahun. Namun demikian, terdapat tren penurunan pertumbuhan pada BRI, Bank Mandiri, dan BCA, sedangkan BNI relatif stabil.

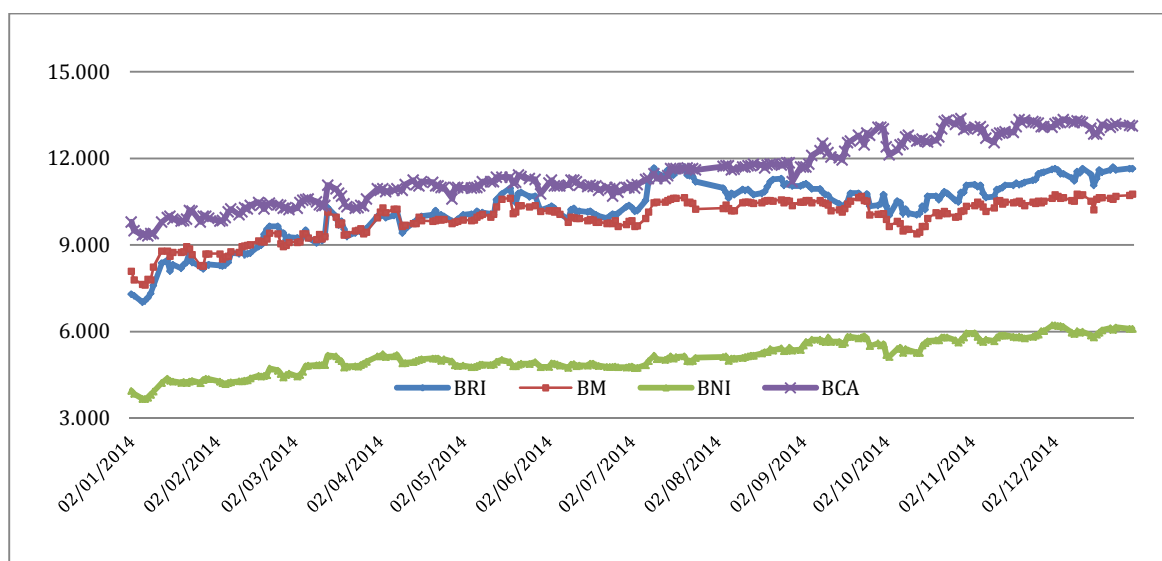
Berdasarkan nilai buku ekuitas sebagaimana tercatat dalam **Tabel 4.7**, ketiga bank BUMN membukukan kenaikan ekuitas setiap tahunnya. Dalam periode 2010 s.d. 2014, ekuitas Bank Mandiri rata-rata meningkat 26,7% per tahun, BRI 27,9% per tahun, BNI 16,7% per tahun, dan BCA 22,9% per tahun. Kenaikan ekuitas disebabkan oleh keberhasilan bank BUMN tersebut dalam meraih laba bersih. Data ini menunjukkan bahwa ekuitas bank BUMN, khususnya BRI mempunyai pertumbuhan yang baik dan tidak kalah bersaing dengan bank swasta nasional.

Tabel 4.7. Perkembangan Ekuitas Bank BUMN (Rp Miliar)

EKUITAS	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mandiri	42.070	62.654	75.756	88.791	104.844
Bank Rakyat Indonesia	36.673	49.820	64.882	79.327	97.737
Bank Nasional Indonesia	33.150	37.843	43.525	47.684	61.021
Bank Central Asia	34.108	42.027	51.898	63.967	77.921

Sumber : Bank Mandiri, BRI, BNI, & BCA. (2015).

Berdasarkan nilai pasar sebagaimana terlihat dalam **Gambar 4.2**, nilai kekayaan pemegang saham juga meningkat. Nilai kekayaan pemegang saham per akhir Desember 2014 pada BRI meningkat sebesar 59,6% dari periode tahun sebelumnya, pada Bank Mandiri sebesar 33,0%, pada BNI sebesar 54,4%, dan BCA sebesar 33,9%.



Sumber : Blomberg. 2015. Keterangan : data harga saham harian berdasarkan harga penutupan.

Gambar 4.2. Perkembangan Harga Saham.

4.2.5. Kekuatan Permodalan

Dari sisi kekuatan permodalan yang diindikasikan melalui indikator CAR, bank BUMN dan BCA mengalami penguatan, dan jauh di atas ketentuan BI yang menetapkan penyediaan modal minimal antara 8% s.d. 14% sebagaimana tertera dalam PBI No. 15/ 12 /PBI/2013. BRI memiliki kecukupan modal yang tertinggi atau lebih baik di antara bank BUMN lainnya dan BCA. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesinambungan BRI lebih baik dibandingkan dengan bank lainnya.

Tabel 4.8. Kecukupan Modal Minimal (Persen)

Kecukupan Modal (CAR)	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mandiri	13,36	15,34	15,48	14,93	16,60
Bank Rakyat Indonesia	13,76	14,96	16,95	16,99	18,31
Bank Negara Indonesia	18,60	17,60	16,70	15,10	16,22
Bank Central Asia	13,50	12,70	14,20	15,70	16,90

Sumber : Bank Mandiri, BRI, BNI, & BCA. 2015.

4.2.6. Posisi Bank BUMN dalam ASEAN Bank

Kinerja bank BUMN perlu juga dibandingkan dengan bank-bank sekawasan ASEAN. The Banker (2014) melakukan pemeringkatan bank-bank komersial di kawasan ASEAN berdasarkan beberapa kategori, yaitu 1) *tier 1 growth*, 2) *return on capital*, 3) *cost to income ratio*, 4) *assets growth*, 5) *return on assets*, dan 6) *pre-tax profit*. Berdasarkan kategori tersebut, bank BUMN masuk dalam sepuluh besar terbaik dalam kategori *return on capital*, *return on assets*, dan *pre-tax profit*.

Tabel 4.9. Peringkat Bank di ASEAN

Bank	Pre-Tax Profit	Bank	Return on Capital	Bank	ROA
OCBC	4,053.81	BRI	55.91	Baoviet Bank	9.15
DBS Bank	3,763.89	Malaysia Building Society	55.84	BRI	4.33
United Overseas Bank	2,737.88	Aceda Bank	49.48	Bank BTPN	4.21
Maybank	2,581.62	Standard Chartered Bank Indonesia	43.46	Aceda Bank	4.13
BRI	2,467.38	Bank BTPN	43.19	ANZ Bank Indonesia	4.07
Bank Mandiri	2,109.71	Deutsche Bank Indonesia	43.05	Citibank Indonesia	4.03
CIMB Group	1,843.69	BCA	39.52	Deutsche Bank Indonesia	3.90
Siam Commercial Bank	1,671.03	Bank Mandiri	39.38	Rizal Commercial Banking CoRp	3.67
Public Ban	1,669.04	HSBC Bank Malaysia	37.57	Korea Exchange Bank Indonesia	3.60
Kasikornbank	1,599.01	CIMB Group	36.16	Ban Aceh	3.53

Sumber : The Banker. 2014. Keterangan : Pre Tax Profit dalam USD Juta dan ROA dalam %.

4.3. Kinerja dan Potensi Daya Ungkit (*Leverage*)

Dalam hal daya ungkit atau kemampuan meningkatkan sumber pembiayaan yang berasal dari pihak eksternal, Bank Mandiri dan BRI memiliki daya ungkit yang paling besar yaitu sebesar 8,2 kali dari ekuitas per tahun 2014. Sementara itu, bank lainnya seperti BNI dan BCA jauh dibawahnya, masing-masing 6,8 kali dan 7,1 kali. Secara rata-rata, daya ungkit bank BUMN mengalami penurunan dalam periode 2010 s.d. 2014, Bank Mandiri turun 6,3% per tahun, sedangkan BRI dan BNI masing-masing turun 6,9% per tahun dan 1,9% per tahun. Penurunan tersebut disebabkan pertumbuhan ekuitas yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan aset yang dikelola oleh bank-bank tersebut. Sebagai contoh, ekuitas BRI tumbuh rata-rata 27,9% per tahun selama periode 2010 s.d. 2014, sedangkan asetnya tumbuh rata-rata 18,8% per tahun dalam periode yang sama. Bila kondisi daya ungkit dikaitkan dengan perkembangan inflasi yang cenderung tinggi, tampaknya ada beberapa indikasi perubahan perilaku di masyarakat. Perubahan perilaku tersebut

kemungkinan besar adalah adanya *shifting* penempatan dana dari perbankan ke lembaga keuangan atau digunakan untuk pembiayaan sektor riil. Detail perkembangan daya ungkit dapat dilihat dalam **Tabel 4.10**.

Tabel 4.10. Rasio Aset Terhadap Ekuitas (Kali)

DAYA UNGKIT	2010	2011	2012	2013	2014
Bank Mandiri	10,7	8,8	8,4	8,3	8,2
Bank Rakyat Indonesia	11,0	9,4	8,5	7,9	8,2
Bank Negara Indonesia	7,5	7,9	7,7	8,1	6,8
Bank Central Asia	9,5	9,1	8,5	7,8	7,1

Sumber : Bank Mandiri, BRI, BNI, & BCA. 2015. Diolah.

Sementara itu, bila Pemerintah akan memberikan stimulus berupa PMN kepada bank BUMN maka akan terdapat potensi *multiplier* dana yang berasal dari : 1) penambahan ekuitas dana dari publik mengingat ketiga bank BUMN merupakan perseroan terbuka atau *go public* di pasar modal dengan asumsi publik mempertahankan persentase kepemilikannya, dan 2) kemampuan *leverage* yang berasal dari kenaikan ekuitas. Berikut perhitungan potensi dana yang dapat terjadi dengan asumsi Pemerintah memberikan PMN sebesar Rp1 triliun untuk masing-masing bank.

Tabel 4.11. Potensi *Leverage*

Bank BUMN	PMN	% Kepemilikan		PMN + Ekuitas Publik*	Aset to equity ratio 2014	Potensi Leverage***
		Pemerintah	Publik			
Bank Mandiri	1 T	60%	40%	1,667 T	8,2	14,448 T
Bank Rakyat Indonesia	1 T	56,75%	43,25%	1,762 T	8,2	13,669 T
Bank Negara Indonesia	1 T	60%	40%	1,667 T	6,8	11,336 T
Total	3 T			5,096 T		39,453 T

Sumber : Perhitungan penulis.

Keterangan : * berasal dari hitungan Rp1T/% kepemilikan pemerintah, ** aset to equity ratio 2014, dan *** berasal dari PMN+Ekuitas Publik x aset to equity ratio

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa penambahan PMN sebesar Rp3 triliun dapat menghasilkan tambahan dana yang dikelola menjadi Rp41,54 triliun. Jumlah tersebut berasal dari penambahan dana pihak ketiga *leverage* sebesar Rp39,45 triliun, ekuitas dari public Rp2,09 triliun. Potensi ini semakin besar bila PMN diberikan kepada bank BUMN yang memiliki *asset to equity ratio* yang besar.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, tampak bahwa kebijakan pemberian stimulus berupa PMN kepada Bank BUMN layak untuk dipertimbangkan, khususnya kepada Bank Mandiri dan BRI. Dari sisi penyaluran kredit, kedua bank mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan BCA. LDR nya pun dalam kategori sehat bila merujuk pada PBI. Dari sisi kinerja keuangan, bank BUMN mampu meraih keuntungan yang besar, di atas kinerja BCA, meskipun BOPO dan NPL di bawah kinerja BCA. Namun demikian, BOPO dan NPL masih tetap dalam kondisi sehat bila merujuk pada ketentuan PBI yang berlaku.

Kinerja keuangan semakin terlihat baik manakala CAR bank BUMN mengalami penguatan, dan jauh di atas batas minimal ketentuan yang berlaku. Karena itu, pencapaian kinerja keuangan ini menunjukkan bahwa bank BUMN dalam kondisi sehat dan diperkirakan mampu membayar kembali kewajibannya. Dari sisi kinerja *leverage*, Bank BUMN mempunyai kemampuan *leverage* di atas BCA. *Assets to equity ratio* Bank Mandiri dan BRI sekitar 8,2 kali, sedangkan BCA sekitar 7,1 kali. Bila potensi *leverage* ini dihitung, maka dengan PMN Rp3 triliun, bank BUMN dapat mengumpulkan dana pihak ketiga sebesar Rp41,54 triliun yang terdiri dari Rp39,45 berupa kewajiban dan Rp2,09 triliun berupa ekuitas baru

Selain itu, dari sisi kepentingan keuangan Pemerintah, Bank Mandiri dan BRI menunjukkan kinerja yang baik sebagaimana terlihat dari kontribusi pajak, ROE, perkembangan ekuitas, dan perkembangan harga saham di bursa efek yang cenderung meningkat. Di samping itu, ditingkat level ASEAN, bank BUMN juga mendapat pengakuan yang baik dengan masuknya 2 bank BUMN dalam sepuluh besar bank terbaik 2014 atau *the best ten* di ASEAN dengan kategori *return on capital*, *return on assets*, dan *pre-tax profit*.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang kurang optimal dan perlu diperbaiki. Pertama adanya indikator LDR yang terlalu aman namun menimbulkan *trade off* yang berupa adanya dana *idle* pihak ketiga. Kedua, permasalahan efisiensi yang ditunjukkan kurang kompetitifnya BOPO dan SBDK, atau masih di bawah kinerja BCA. Ketiga, adanya kecenderungan menurun atas indikator *asset to equity ratio* yang menunjukkan kemampuan *leverage* bank BUMN yang menurun selama periode 2010 s.d 2015.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, otomatis rekomendasi utama paper ini adalah diimplementasikannya gagasan pemberian PMN kepada bank BUMN khususnya Bank Mandiri dan BRI sebagai upaya untuk meningkatkan sumber pendanaan pembangunan. Namun demikian, perlu pula diikuti oleh beberapa rekomendasi tambahan, antara lain : 1) mendorong bank BUMN untuk memperbaiki permasalahan efisiensi (BOPO dan NPL), 2) menyusun indikator kinerja para direksi bank BUMN untuk lebih memastikan bahwa tujuan pemberian PMN dapat tercapai, dan 3) mengarahkan penyaluran dana yang terkumpul untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko rendah.

Dalam hal Pemerintah akan menambah PMN pada bank BUMN, tampaknya layak diberikan kepada Bank Mandiri apabila Pemerintah berkeinginan meningkatkan sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur. Pengalaman kerja dalam penyaluran kredit pada debitor besar Bank Mandiri tampaknya lebih baik dibandingkan dengan BRI. Namun, apabila berkeinginan untuk meningkatkan sumber pembiayaan yang diperuntukan untuk UMKM dan petani, maka PMN layak diberikan kepada BRI. Beda dengan Bank Mandiri, BRI lebih berpengalaman dalam melayani debitor UMKM dan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L.S. & Herdinigtyas, W. (2005). Analisis Rasio Camel terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol. 7, No. 2. <http://citation.itb.ac.id/pdf/akun-petra/16448-16446-1-PB.pdf>.
- Anda, P. (2014). Bank Sebagai Intermediasi Perekonomian. Diakses pada 13 Maret 2015, dari <http://andaputraa.blogspot.com/search?q=bank+sebagai+intermediasi+perekonomian>.

- Asian Development Bank. (2014). ADB Report: Key Indicators for Asia and The Pacific 2014. 45th Edition.
- Bank Dunia. (2010). The World Bank Report: Improving Access to Financial Services in Indonesia. Diakses pada 4 Februari 2015, dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/World%20Bank%20Report%20-%20Improving%20Access%20to%20Financial%20Services%20in%20Indonesia.pdf>.
- Bank Central Asia. (2011-2015). Laporan Tahunan 2010 – 2014.
- Bank Indonesia. (2015). Statistik Perbankan Indonesia – Desember 2014. Vol. 13, No. 1.
- Bank Negara Indonesia. (2011-2015). Laporan Tahunan 2010 – 2014.
- Bank Mandiri. (2011 – 2015). Laporan Tahunan 2010 – 2014.
- Bank Rakyat Indonesia. (2011 – 2015). Laporan Tahunan 2010 – 2014.
- Budisantoso, T. & Triandaru, S. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Irwan, Lella N.Q.. (2010). Tinjauan terhadap Fungsi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intermediasi Perbankan Nasional. *Jurnal Trikonomika*, Vol. 9, No. 2.
- Kiryanto, R. (2012). Strategi Implementasi Program Inklusi Keuangan di Indonesia. Diakses pada 4 Februari 2015, dari <http://www.infobanknews.com/2012/08/strategi-implementasi-program-inklusi-keuangan-di-indonesia/>.
- Konadi, W. (2014). Analisis Kredit Investasi Perbankan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Kebangsaan*, Vol.3, No.6.
- Rahmawati, A. (2011). Analisis Pengaruh Net Interest Margin (NIM) dan Loan To Deposit Ratio (LDR) Terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank BUMN di Indonesia. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Diakses pada 4 Maret 2015, dari <http://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-anggitrac-26828>.
- Setifandy, T. (2014). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Makroekonomi Terhadap NPL KPR : Studi Kasus Pada Bank Umum Periode 2010-2013. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIBRAW*. Diakses pada 6 Mei 2015, dari <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1401/1294>.
- Sudiyatno, B. & Suroso, J. (2010). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bopo, Car Dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Periode 2005-2008). *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2.
- Sukarno, K. W. & Syaichu, M. (2006). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, Vol. 3, No. 2.
- The Banker. (2014). Top 100 Asean banks ranking, 2014: Small Countries, Big Growth. Diakses pada 24 Februari 2015, dari <http://www.thebanker.com/Banker-Data/Banker-Rankings/Top-100-Asean-banks-ranking-2014-Small-countries-big-growth?ct=true>.

Widiari, L., Adiputra, I.M.D., & Sinarwati, N.K. (2014). Analisis Pengaruh Loan To Deposit Ratio(LDR) dan Suku Bunga Kredit Terhadap Pendapatan Bunga Bank Pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Singaraja Periode 2008-2012. *E-Journal Jurusan Akuntansi Program S1*, Vol. 2, No.1.